

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI  
SEKTOR PUBLIK  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**Benoit Isadora Juita Wunu Djoka  
NIM: 072114096**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2011**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI  
SEKTOR PUBLIK  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**Benoit Isadora Juita Wunu Djoka  
NIM: 072114096**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI  
SEKTOR PUBLIK  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

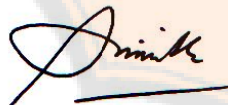
Oleh:

**Benoit Isadora Juita Wunu Djoka**

**NIM: 072114096**

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.,QIA

Tanggal: 10 Agustus 2011

SKRIPSI

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI  
SEKTOR PUBLIK  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
Benoit Isadora Juita Wunu Djoka  
NIM: 072114096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 26 Juli 2011  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Lengkap**

**Tanda Tangan**

Ketua	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA
Sekretaris	Josephine Wuri, SE., M.Si.
Anggota	Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

*[Handwritten signatures of the five members of the examination board]*

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



*[Handwritten signature of the Dean]*  
Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

## MOTTO

*Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan  
percayalah kepadaNya, dan Ia akan bertindak;  
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang,  
dan hakmu seperti siang.*

*(Mazmur 37 : 5 & 6)*

*Aku mengucap syukur kepada Allahku  
setiap kali aku mengingat kamu*

*(Filipi 1: 3)*

*Kupersembahkan untuk:*

*Juru selamat Jesus Chirst dan Bunda Maria penolong sejati  
Bapakku Paschalys Djoka dan ibuku Yustina Mbu Pa*

*Adik-adik ku Angel, Hans, dan Maya*

*My lovely Fidelis Oddie*

*Semua Keluarga Besarku*



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan Value For Money Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Juli 2011

Yang menyatakan

Benoit Isadora Juita Wunu Djoka

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Benoit Isadora Juita Wunu Djoka

Nomor Mahasiswa : 072114096

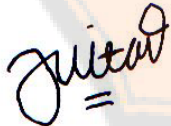
Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Juli 2011

Yang Menyatakan,



Benoit Isadora Juita Wunu Djoka

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Kaprodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
4. Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan kerjasama yang baik selama penulis belajar di Universitas Sanata Dharma serta staf perpustakaan yang telah membantu menyediakan buku-buku yang dibutuhkan penulis.
6. Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Orangtua yang selalu mendokan dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Adik-adik, Angel, Hans, dan Maya serta *my lovely*, Fidelis Oddie yang selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan masukan-masukan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2011

  
Benoit Isadora Juita Wunu Djoka

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR GRAFIK .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
A. Pengukuran Kinerja.....	6
1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	6
2. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	6
3. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	7
4. Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja.....	8
B. Organisasi Sektor Publik .....	9
1. Definisi Organisasi Sektor Publik .....	9
2. Alasan Dibutuhkan Organisasi Sektor Publik .....	9
C. <i>Value For Money</i> .....	10
1. Definisi <i>Value For Money</i> .....	10

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Definisi pengukuran <i>Value For Money</i> .....	14
3. Manfaat pengukuran <i>Value For Money</i> .....	15
4. Langkah Pengukuran <i>Value For Money</i> .....	15
D. Laporan Realisasi Anggaran.....	17
E. PenelitianTerdahulu.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	22
D. Data yang Dibutuhkan.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	24
G. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	31
B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta.....	32
C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.....	34
D. Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta .....	35
E. Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta .....	36
F. Proses Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	37
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	
A. Deskripsi Data Komparatif.....	42
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan Penelitian .....	64
C. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN.....	69
A. Lampiran I: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009 .....	70
B. Lampiran II: Keterangan Izin Penelitian .....	85



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2005 – 2009 .....	26
Tabel 5.1 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2005 .....	42
Tabel 5.2 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006 .....	44
Tabel 5.3 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2007 .....	46
Tabel 5.4 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2008 .....	48
Tabel 5.5 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009 .....	50
Tabel 5.6 Perhitungan ukuran ekonomis laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	55
Tabel 5.7 Perhitungan ukuran efisiensi laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	57
Tabel 5.8 Perhitungan ukuran ekonomis laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	60

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 5.1 Rasio ekonomis Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	55
Grafik 5.2 Rasio efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	58
Grafik 5.3 Rasio efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 .....	61



**ABSTRAK**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI  
SEKTOR PUBLIK  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Benoit Isadora Juita Wunu Djoka  
NIM: 072114096  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009 yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif yaitu suatu cara dalam mengemukakan dan menggambarkan data dan fakta yang ada dengan cara membandingkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 dan analisis pendekatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan pengukuran *value for money* yaitu mengukur kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan tiga elemen pengukuran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 sudah ekonomis dan efektif tetapi tidak efisien; kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sudah ekonomis dan efisien tetapi tidak efektif; kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sudah ekonomis, efisien, dan efektif; kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sudah ekonomis, efisien, dan efektif dan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 sudah ekonomis dan efektif tetapi tidak efisien.

**ABSTRACT**

**AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE MEASUREMENT  
OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS  
USING VALUE FOR MONEY APPROACH**

**A Case Study at Municipality Government Of Yogyakarta**

Benoit Isadora Juita Wunu Djoka  
NIM: 072114096  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2011

The aim of this study was to know the performance of Municipality Government of Yogyakarta in 2005 – 2009 which was measured using value for money approach.

The type of this study was case study in the Municipality Government of Yogyakarta. This study obtained the data by interview and documentation. The data analysis technique was descriptive-comparative analysis, that is a way to show and describe the data and facts by comparing the budget realization report of Yogyakarta Municipality Government from 2005 – 2009, and analysis of performance measurement of public sector organizations using value for money approach by measuring the performance of Yogyakarta Municipality Government using three elements of measurement those were economic, efficiency, and effectiveness.

The result of the data analysis showed that the performance of Yogyakarta Municipality Government in 2005 had been economical and effective but not efficient; the performance of Yogyakarta Municipality Government in 2006 had been economical and efficient but not effective; the performance of Yogyakarta Municipality Government in 2007 had been economical, efficient, and effective; the performance of Yogyakarta Municipality Government in 2008 had been economical, efficient, and effective; and the performance of Yogyakarta Municipality Government in 2009 had been economical and effective but not efficient.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat terwujud *good governance* dengan sebenarnya (Mahmudi, 2006:19).

Dengan terwujudnya *good governance* ini diharapkan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan-tujuan maupun target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur atau menilai kinerja organisasi sektor publik dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu: (1) analisis anggaran, (2) analisis rasio laporan keuangan, (3) *balanced scorecard method*, dan (4) *performance audit* (pengukuran *value for money*). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang ke-4 yaitu *value for money* kerana pendekatan ini memberikan manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, penghematan dalam pemakaian sumber daya, alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Pengukuran *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi,

dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan, efisiensi berkaitan dengan seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan *input* dengan *output*. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

Untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik dapat menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini terdiri dari beberapa elemen yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Lampiran Keuangan BUMD.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan salah satu elemen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki prioritas yang lebih penting. Laporan realisasi anggaran ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan

realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil pokok permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu:

“Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009 yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009 yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan acuan pustaka atau bahan bacaan, sehingga dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mendalami topik yang sama.

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik yang menggunakan pengukuran *value for money*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi tahap dalam menerapkan teori-teori akuntansi keuangan dan sektor publik yang pernah didapatkan di bangku kuliah maupun dari sumber-sumber bacaan.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdapat enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan cara-cara yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan,

teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik analisis data.

**BAB IV : Gambaran Umum**

Bab ini menguraikan gambaran umum Kota Yogyakarta, gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta, visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta strategi pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dan proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi objek penelitian.

**BAB V : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang diperoleh, analisis data, serta membahas dan menjawab permasalahan yang dimunculkan dengan metode yang telah ditetapkan.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian serta saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengukuran Kinerja

##### 1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2009:25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja ini dapat diketahui jika individu atau kelompok individu atau suatu organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Sedangkan menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2009:25) pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

##### 2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja dimana pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### 3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:122) manfaat pengukuran kinerja antara lain:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja yang telah disepakati.

- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### 4. Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2010:123) ada dua informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu:

##### a. Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- 1) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- 2) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
  - a) Varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
  - b) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

Setelah dilakukan analisis varians, maka akan dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang



bertanggungjawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah.

b. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variabel*) atau sering dinamakan sebagai *key success factor*, *key result factor*, atau *pulse point*. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan.

**B. Organisasi Sektor Publik**

1. Definisi Organisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006:14) organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur dengan hukum.

2. Alasan Dibutuhkan Organisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun (2009:19-20) beberapa alasan, mengapa organisasi sektor publik dibutuhkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.
- b. Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir dan sebagainya.
- c. Untuk menjamin bahwa *public goods and service* disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan yang serupa.
- d. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku.
- e. Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundangan yang kuat dan jelas.

### C. *Value For Money*

#### 1. Definisi *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2010:83) *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata *value* dan *money*, konsep *value for money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *time value of money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value of money* memiliki

pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

a. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut (Mahmudi, 2010:83-84). *Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input value* adalah dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Pada penelitian ini digunakan laporan realisasi anggaran, dimana yang menjadi *input* dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi belanja dan yang menjadi *input value* adalah anggaran belanja.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Input Value* : Anggaran Belanja

Ekonomi merupakan konsep yang sifatnya relatif. Relativitas konsep ekonomi tersebut bisa disebabkan karena faktor lokasi dan waktu. Kedua faktor tersebut terkait dengan harga pasar untuk *input* yang sama bisa berbeda karena lokasi dan waktunya berbeda. Sebagai contoh harga semen per kg di Jakarta akan berbeda dengan di Jayapura karena lokasi yang berbeda. Faktor waktu juga akan mempengaruhi pertimbangan ekonomi. Sebagai contoh harga komputer dapat berubah setiap waktu tergantung kurs *dollar*. Waktu tersebut merupakan pengertian jangka pendek, menengah, dan panjang atau pengertian musiman (Mahmudi, 2010:84-85).

b. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output*

tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*), (Mahmudi, 2010:85). *Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. Pada penelitian ini digunakan laporan realisasi anggaran, dimana yang menjadi *input* dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi belanja dan yang menjadi *output* adalah realisasi pendapatan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Output* : Realisasi Pendapatan

c. Efektivitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

*Value for money* menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Dengan pengertian lain, *value for money* menghendaki organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah (Mahmudi, 2010:86). *Outcome* adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses yang dinyatakan dalam bentuk anggaran. Pada penelitian ini digunakan laporan realisasi anggaran, dimana yang menjadi *output* dalam laporan realisasi anggaran adalah anggaran pendapatan dan yang menjadi *outcome* adalah realisasi pendapatan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi Pendapatan

*Output* : Anggaran Pendapatan

## 2. Definisi Pengukuran *Value For Money*

Menurut Mahsun (2009:132) pengukuran *value for money* atau disebut juga *performance audit* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan *input* dengan

*output*. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

### 3. Manfaat pengukuran *Value For Money*

Menurut Halim (2002:14) konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa:

- a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Dengan menghilangkan setiap *in-efisiensi* dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

### 4. Langkah Pengukuran Value for Money

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Tujuan pelaksanaan *value for*

*money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:127-130).

Langkah-langkah pengukuran *value for money* tersebut adalah:

a. Pengukuran ekonomi

Pada pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif, karena terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor waktu dan faktor lokasi/tempat.

b. Pengukuran efisiensi

Pada pengukuran ini, efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

c. Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



#### **D. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini contoh format laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk pemerintah kabupaten/kota (PSAP No. 2, Lampiran).

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
2.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
3.	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6.	Lain-lain PAD Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7.	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
8.					
9.	<b>Pendapatan Transfer</b>				
10.	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>				
11.	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya	XXX	XXX	XXX	XXX
13.	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14.	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15.	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
16.					
17.	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
18.	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19.	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20.	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya ( 18 s/d 19)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
21.					
22.	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
23.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
24.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
25.	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
26.	<b>Total pendapatan Transfer ( 15 + 20 + 25)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
27.					
28.	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>				
29.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
30.	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
31.	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
32.	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
33.	<b>JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 26 + 32)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
34.					
35.	<b>BELANJA</b>				
36.	<b>Belanja Operasi</b>				
37.	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
38.	Belanja Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
39.	Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
40.	Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
41.	Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
42.	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
43.	<b>Jumlah Belanja Operasi ( 37 s/d 42)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
44.					

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45.	<b>Belanja Modal</b>				
46.	Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
47.	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
48.	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
49.	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
50.	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
51.	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
52.	<b>Jumlah Belanja Modal ( 46 s/d 51)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
53.					
54.	<b>Belanja Tak Terduga</b>				
55.	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
56.	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
57.	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
58.					
59.	<b>TRANSFER</b>				
60.	<b>Transfer/Bagi Hasil Ke Desa</b>				
61.	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
62.	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XXX	XXX
63.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
64.	<b>Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa (61 s/d 63)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
65.					
66.	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 – 64)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
67.					
68.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
69.					
70.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
71.	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XXX	XXX
72.	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
73.	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
74.	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
75.	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
76.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
77.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
78.	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
79.	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
80.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
81.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
82.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
83.	<b>Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84.		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
86.	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
87.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
88.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
89.	PPPDN - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
90.	PPPDN - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
91.	PPPDN - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
92.	PPPDN - Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
93.	PPPDN - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
94.	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
95.	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
96.	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
97.	<b>Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
98.	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 – 97)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
99.					
100.	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 98)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Berikut ini penjelasan singkat tentang istilah yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (PSAP No. 2: 2 – 4).

1. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
4. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2007) mengangkat masalah “Apakah kinerja Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Bidang Bina Marga Propinsi DIY dalam melaksanakan proyek pembangunan jalan sudah ekonomis, efisien, dan efektif bila dievaluasi dengan pendekatan *value for money*?”.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan pengukuran kinerja Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Bidang Bina Marga Propinsi DIY untuk tahun 2004 dan tahun 2005 sudah ekonomis, efisien, dan efektif bila diukur dengan pendekatan *value for money*. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Bidang Bina Marga Propinsi DIY untuk tahun 2004 dan tahun 2005 dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian secara mendalam terhadap suatu objek tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai objek tersebut. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga kesimpulan dalam penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

###### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, instansi yang terkait adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei - Juni tahun 2011.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

###### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Mereka memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sub bagian umum dan kepegawaian, kepala bidang anggaran dan kepala bidang pelaporan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009.

**D. Data yang Dibutuhkan**

1. Gambaran umum Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang meliputi:
  - a. Sejarah terbentuknya Pemerintah Kota Yogyakarta
  - b. Letak Geografis dan Luas Wilayah
  - c. Visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
  - d. Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, pengumpulan data diperoleh dari:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen ini antara lain: gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan mengenai hal-hal yang tidak ditemui dalam metode pengumpulan data yang lainnya. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan langsung dengan kepala bidang anggaran pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

## F. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

### 1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan diukur dengan pendekatan *value for money* dengan menggunakan pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dimana ekonomi ini akan mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, efisiensi akan mengukur tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap tingkat *outputnya* sektor publik, dan efektivitas akan mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik.

#### a. Ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$



Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Input Value* : Anggaran Belanja

b. Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Output* : Realisasi Pendapatan

c. Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi Pendapatan

*Output* : Anggaran Pendapatan

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009.

**G. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif komparatif yaitu suatu cara dalam mengemukakan dan menggambarkan data dan fakta yang ada dengan cara membandingkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009.

Berikut ini format tabel untuk membandingkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2005 – 2009.

Tabel 3.1  
Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2005 – 2009.

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	.....	.....	.....	.....
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	.....	.....	.....	.....
Pajak Daerah	.....	.....	.....	.....
Retribusi Daerah	.....	.....	.....	.....
Hasil Pengolaan Daerah Yang Dipisahkan	.....	.....	.....	.....
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	.....	.....	.....	.....
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	.....	.....	.....	.....
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	.....	.....	.....	.....
Dana Bagi Hasil Pajak	.....	.....	.....	.....
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	.....	.....	.....	.....
Dana Alokasi Umum	.....	.....	.....	.....
Dana Alokasi Khusus	.....	.....	.....	.....
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	.....	.....	.....	.....
Dana Otonomi Khusus	.....	.....	.....	.....
Dana Penyesuaian	.....	.....	.....	.....

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	.....	.....	.....	.....
Pendapatan Hibah	.....	.....	.....	.....
Pendapatan Dana Darurat	.....	.....	.....	.....
Pendapatan Lainnya	.....	.....	.....	.....
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	.....	.....	.....	.....
Belanja Aset Tetap Lainnya	.....	.....	.....	.....
Belanja Aset Lainnya	.....	.....	.....	.....
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	.....	.....	.....	.....
Belanja Tidak Terduga	.....	.....	.....	.....
<b>TRANSFER</b>	.....	.....	.....	.....
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	.....	.....	.....	.....
<b>JUMLAH BELANJA</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Surplus/(Defisit)</b>	.....	.....	.....	.....
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	.....	.....	.....	.....
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	.....	.....	.....	.....
Pencairan Dana Cadangan	.....	.....	.....	.....
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.....	.....	.....	.....
Penerimaan Pinjaman Daerah	.....	.....	.....	.....
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	.....	.....	.....	.....
Penerimaan Piutang Daerah	.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	.....	.....	.....	.....
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	.....	.....	.....	.....
Pembentukan Dana Cadangan	.....	.....	.....	.....
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	.....	.....	.....	.....
Pembayaran Pokok Utang	.....	.....	.....	.....
Pemberian Pinjaman Daerah	.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Pembiayaan Neto</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	.....	.....	.....	.....

- Analisis pengukuran kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan analisis pengukuran *value for money* yaitu analisis yang menilai kinerja suatu entitas dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis merupakan perbandingan antara *input* dengan

*input value*, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*, sedangkan efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output*. (Mahmudi, 2010:103).

- a. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan dinilai dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009, maka dilakukan pengukuran:

- 1) Ekonomis:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Input Value* : Anggaran Belanja

Kriteria ekonomi adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti ekonomis.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti ekonomi berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti tidak ekonomis.

- 2) Efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Output* : Realisasi Pendapatan

Kriteria efisiensi adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti efisien.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti efisiensi berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti tidak efisien.

3) Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi Pendapatan

*Output* : Anggaran Pendapatan

Kriteria efektivitas adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti efektif.

- b. Membandingkan tingkat ekonomis, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas pada tahun 2005 – 2009. Apakah tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitasnya menurun, meningkat atau stabil serta menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan, peningkatan atau kestabilan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas tersebut.
- c. Menyimpulkan kinerja pada tahun 2005 – 2009 berdasarkan tiga elemen pengukuran di atas.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Kota Yogyakarta ini merupakan ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota dibandingkan dengan 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24'19" sampai 110° 28'53" Bujur Timur dan 7° 15'24" sampai 7° 49'26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

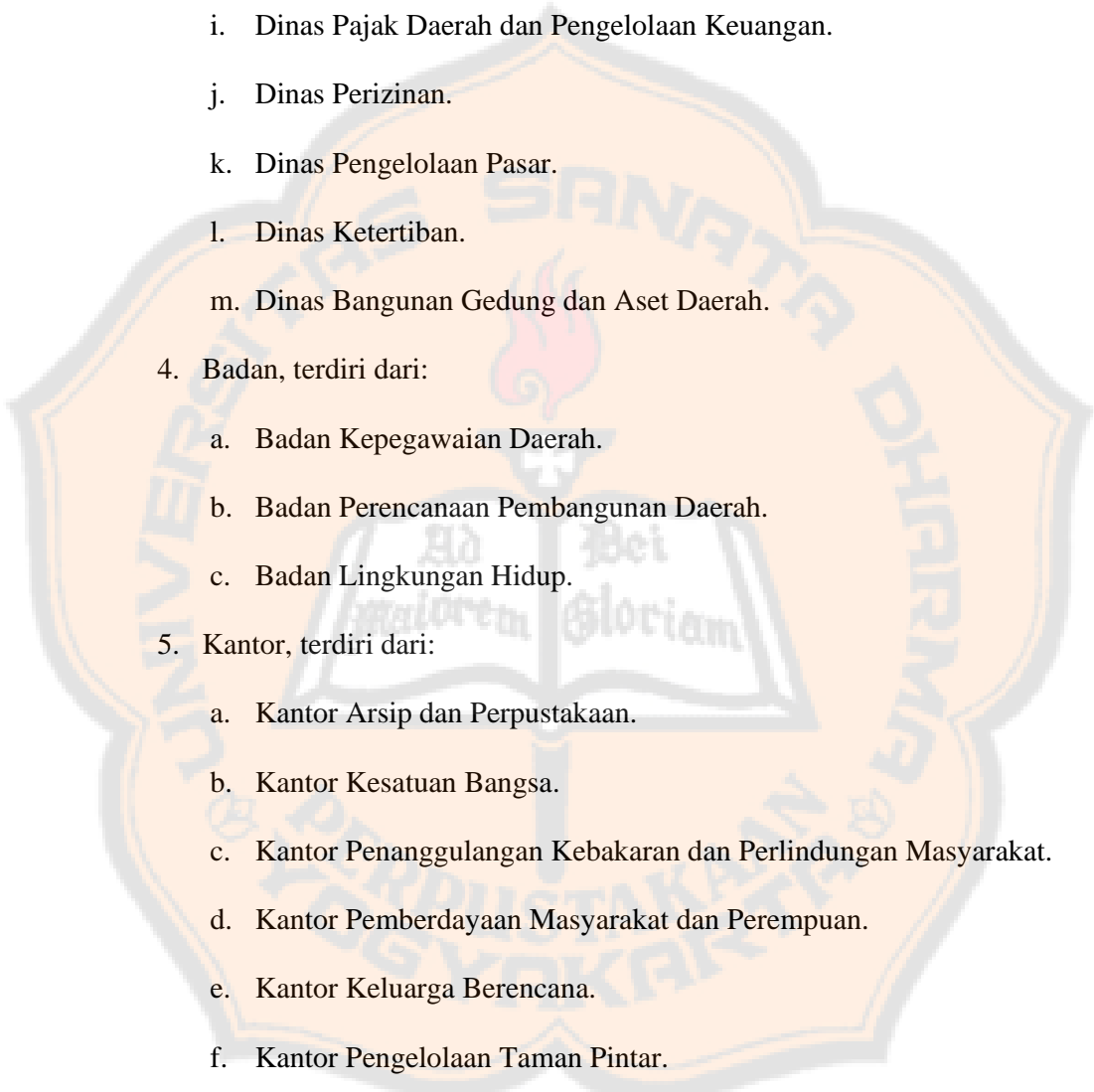
1. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
3. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

## B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta

Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kewenangan yang dimiliki dan kondisi serta potensi Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan penataan ulang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Pemerintahan, membidangi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum. Dan Bagian Organisasi.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, Bagian Pengendalian Pembangunan, dan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membidangi Bagian Umum, Bagian Protokol, dan Bagian Humas dan Informasi.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan.
  - b. Dinas Kesehatan.
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - d. Dinas Perhubungan.
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- 
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - g. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
  - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.
  - i. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
  - j. Dinas Perizinan.
  - k. Dinas Pengelolaan Pasar.
  - l. Dinas Ketertiban.
  - m. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.
4. Badan, terdiri dari:
    - a. Badan Kepegawaian Daerah.
    - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - c. Badan Lingkungan Hidup.
  5. Kantor, terdiri dari:
    - a. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
    - b. Kantor Kesatuan Bangsa.
    - c. Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
    - d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
    - e. Kantor Keluarga Berencana.
    - f. Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
  6. Komisi Pemilihan Umum.
  7. Inspektorat Wilayah Kota Yogyakarta.
  8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdiri dari:
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta.
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Rakyat (BPR) Jogja.
10. Kecamatan, terdiri dari 14 Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari 45 Kelurahan.

### **C. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta**

#### **1. Visi Pemerintah Kota Yogyakarta**

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025, visi Kota Yogyakarta adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang berwawasan lingkungan”. Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

#### **2. Misi Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.
- b. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kota budaya dan kota perjuangan.

- c. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
- d. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
- f. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
- g. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
- i. Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat.

#### **D. Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta**

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2025, dalam upaya menuju tercapainya visi jangka panjang 20 tahun dimaksud, maka ditetapkan sasaran pembangunan tahun 2007 – 2011 pada bidang pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa sebagai berikut:

1. Pendidikan, sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul.
2. Pariwisata, sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman objek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan Jasa, sebagai kota pelayanan jasa dengan dukungan peran serta masyarakat.

Sasaran pembangunan tersebut dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2007 – 2011 dijabarkan dalam tematik pembangunan, kebijakan dan program pembangunan serta rencana aksi daerah.

#### **E. Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dengan mengacu pada tahap-tahap yang jelas selama 5 tahun pembangunan kota menuju tercapainya visi antara Kota Yogyakarta 2007 – 2011 maka perlu ditetapkan strategi pembanguana daerah dalam bentuk tematik pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 2007 – 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2007 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman, perkotaan, pelayanan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Tahun 2008 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
3. Tahun 2009 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional.
4. Tahun 2010 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan nyaman huni dengan pengelolaan fasilitas pelayanan publik yang memadai.

5. Tahun 2011 tematik pembangunan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat populasi yang didukung dengan pelayanan yang optimal.

#### **F. Proses Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- a. Membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan RKPD, Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ini berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara ini dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan,
- 2) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan,
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

d. Rencana Kerja dan Anggaran

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). RKA-SKPD selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian

kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

f. Peraturan Daerah (Perda) APBD

Kepala daerah menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Raperda APBD yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada kepala daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah



tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.



**BAB V**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Analisis data dan pembahasan akan dilakukan pada bab ini untuk menjawab rumusan masalah pada bab I, yaitu mengenai kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009 yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*.

**A. Deskripsi Data Komparatif**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kota yogyakarta tahun 2005 – 2009.

Tabel 5.1  
Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2005.

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>368.226.057.000,00</b>	<b>391.886.902.046,24</b>	<b>23.660.845.046,24</b>	<b>106,43</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>84.335.352.000,00</b>	<b>89.196.416.784,70</b>	<b>4.861.064.784,70</b>	<b>105,76</b>
1 1 1	Pajak Daerah	43.365.000.000,00	46.106.723.374,00	2.741.723.374,00	106,32
1 1 2	Retribusi Daerah	23.122.648.000,00	22.797.438.571,50	(325.209.428,50)	98,59
1 1 3	Hasil Pengolaan Daerah Yang Dipisahkan	6.651.516.000,00	6.651.516.000,00	-	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.196.188.000,00	13.640.720.038,48	2.444.532.038,48	121,83
<b>1 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>268.347.705.000,00</b>	<b>289.257.620.761,54</b>	<b>20.909.915.761,54</b>	<b>107,79</b>
1 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	32.791.705.000,00	201.231.000.000,00	6.654.724.477,00	120,29
1 2 2	Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	201.231.000.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	-	100,00
1 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27.725.000.000,00	41.980.191.284,54	14.255.191.284,54	151,42

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>15.543.000.000,00</b>	<b>13.432.864.500,00</b>	<b>(2.110.135.500,00)</b>	<b>86,42</b>
13102	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	-	-	-	-
13103	Dana Penyesuaian Ad Hoc	11.943.000.000,00	11.943.000.000,00	-	100,00
13104	Hibah	3,600.000.000,00	1.489.864.500,00	(2.110.135.500,00)	41,39
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>450.650.006.904,00</b>	<b>399.244.605.370,45</b>	<b>(51.405.401.533,55)</b>	<b>88,59</b>
<b>21</b>	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>70.775.136.313,00</b>	<b>64.390.925.069,82</b>	<b>(6.384.211.243,18)</b>	<b>90,98</b>
<b>211</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>31.216.908.010,00</b>	<b>28.980.600.331,82</b>	<b>(2.236.307.678,18)</b>	<b>92,84</b>
2111	Belanja Pegawai/Personalia	26.218.096.337,00	24.350.880.584,30	(1.867.215.752,70)	92,88
2112	Belanja Barang dan Jasa	3.231.814.453,00	3.058.801.526,52	(173.012.926,48)	94,65
2113	Belanja Perjalanan Dinas	854.373.000,00	801.593.680,00	(52.779.320,00)	93,82
2114	Belanja Pemeliharaan	912.624.220,00	769.324.541,00	(143.299.679,00)	84,30
<b>212</b>	<b>Belanja Operasi&amp;Pemeliharaan</b>	<b>23.553.179.103,00</b>	<b>20.844.064.912,00</b>	<b>(2.709.113.191,00)</b>	<b>88,50</b>
2121	Belanja Pegawai/Personalia	6.577.330.250,00	5.951.909.400,00	(625.420.850,00)	90,49
2122	Belanja Barang dan Jasa	14.315.903.453,00	12.634.703.372,00	(1.681.200.081,00)	88,26
2123	Belanja Perjalanan Dinas	2.161.673.000,00	1.841.455.690,00	(320.217.310,00)	85,19
2124	Belanja Pemeliharaan	498.272.400,00	415.996.450,00	(82.275.950,00)	83,49
<b>213</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>16.005.049.200,00</b>	<b>14.566.259.826,00</b>	<b>(1.438.789.374,00)</b>	<b>91,01</b>
<b>22</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>379.874.870.591,00</b>	<b>334.853.680.300,63</b>	<b>(45.021.190.290,37)</b>	<b>88,15</b>
<b>221</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>206.850.889.421,00</b>	<b>188.968.325.856,00</b>	<b>(17.882.563.565,00)</b>	<b>91,35</b>
2211	Belanja Pegawai/Personalia	182.842.291.930,00	168.033.445.090,00	(14.808.846.840,00)	91,90
2212	Belanja Barang dan Jasa	16.367.006.461,00	13.742.583.438,00	(2.624.423.023,00)	83,97
2213	Belanja Perjalanan Dinas	1.918.786.000,00	1.813.068.550,00	(105.717.450,00)	94,49
2214	Belanja Pemeliharaan	5.722.805.030,00	5.379.228.778,00	(343.576.252,00)	94,00
<b>222</b>	<b>Belanja Operasi&amp;Pemeliharaan</b>	<b>46.963.795.025,00</b>	<b>43.301.882.300,00</b>	<b>(3.661.912.725,00)</b>	<b>92,20</b>
2221	Belanja Pegawai/Personalia	9.031.819.490,00	8.479.043.400,00	(552.776.090,00)	93,88
2222	Belanja Barang dan Jasa	23.977.871.135,00	22.051.546.267,00	(1.926.324.868,00)	91,97
2223	Belanja Perjalanan Dinas	4.771.235.000,00	4.212.346.690,00	(558.888.310,00)	88,29
2224	Belanja Pemeliharaan	9.182.869.400,00	8.558.945.943,00	(623.923.457,00)	93,21
<b>223</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>61.189.780.925,00</b>	<b>55.621.387.991,93</b>	<b>(5.568.392.933,07)</b>	<b>90,90</b>
<b>23</b>	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	<b>47.870.405.220,00</b>	<b>45.118.547.802,70</b>	<b>(2.751.857.417,30)</b>	<b>94,25</b>
<b>24</b>	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>1.843.536.350,00</b>	<b>(15.156.463.650,00)</b>	<b>10,84</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>450.650.006.904,00</b>	<b>399.244.605.370,00</b>	<b>(51.405.401.534,00)</b>	<b>88,59</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(82.423.949.904,00)</b>	<b>(7.357.703.324,21)</b>	<b>75.066.246.579,79</b>	<b>8,93</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>31</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>91.658.309.815,00</b>	<b>92.695.114.821,51</b>	<b>1.036.805.006,51</b>	<b>101,13</b>
311	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu	72.622.268.370,00	73.659.073.376,51	1.036.805.006,51	101,43
312	Transfer dari Dana Cadangan	19.036.041.445,00	19.036.041.445,00	-	100,00
313	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-
314	Hasil Penjualan Aset daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
315	Hibah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>91.658.309.815,00</b>	<b>92.695.114.821,51</b>	<b>1.036.805.006,51</b>	<b>101,13</b>

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>3 2</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>9.234.359.911,00</b>	<b>85.337.411.497,30</b>	<b>76.103.051.586,30</b>	<b>924,13</b>
3 2 1	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal	6.446.042.500,00	6.446.042.500,00	-	100,00
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	1.032.600.000,00	1.032.398.926,35	(201.073,65)	99,98
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2005	880.717.411,00	76.983.970.898,15	76.103.253.487,15	8.741,05
3 2 5	Pemberian Pinjaman Daerah	875.000.000,00	875.000.000,00	-	100,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>9.234.359.911,00</b>	<b>85.337.411.497,30</b>	<b>76.103.051.586,30</b>	<b>924,13</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>82.423.949.904,00</b>	<b>7.357.703.324,21</b>	<b>(75.066.246.579,79)</b>	<b>8,93</b>
<b>3 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2005</b>	<b>-</b>	<b>76.983.970.898,15</b>	<b>76.983.970.898,15</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data sekunder Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.2

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006.

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>525.324.969.259,00</b>	<b>519.022.237.321,64</b>	<b>(6.302.731.937,36)</b>	<b>98,80</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.257.494.000,00</b>	<b>96.419.456.304,52</b>	<b>1.161.962.304,52</b>	<b>101,22</b>
1 1 1	Pajak Daerah	42.678.850.000,00	43.997.150.025,00	1.318.300.025,00	103,09
1 1 2	Retribusi Daerah	25.028.663.530,00	24.704.781.369,00	(323.882.161,00)	98,71
1 1 3	Hasil Pengolaan Daerah Yang Dipisahkan	6.885.906.000,00	7.722.505.202,62	836.599.202,62	112,15
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20.664.074.470,00	19.995.019.680,90	(669.054.789,10)	96,76
<b>1 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>403.865.122.259,00</b>	<b>397.150.853.946,12</b>	<b>(6.714.268.312,88)</b>	<b>98,34</b>
1 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.890.203.091,00	40.145.140.985,00	11.254.937.894,00	138,96
1 2 2	Dana Alokasi Umum	316.832.000.000,00	316.832.000.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	-	100,00
1 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	53.342.919.168,00	35.373.712.961,12	(17.969.206.206,88)	66,31
<b>1 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>26.202.353.000,00</b>	<b>25.451.927.071,00</b>	<b>(750.425.929,00)</b>	<b>97,14</b>
1 3 1 02	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbng dari Pemerintah	-	-	-	-
1 3 1 03	Dana Penyesuaian Ad Hoc	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	100,00
1 3 1 04	Hibah	11.202.353.000,00	10.451.927.071,00	(750.425.929,00)	93,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>525.324.969.259,00</b>	<b>519.022.237.321,64</b>	<b>(6.302.731.937,36)</b>	<b>98,80</b>

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>609.842.151.424,00</b>	<b>496.768.977.052,30</b>	<b>(113.073.174.371,70)</b>	<b>81,46</b>
<b>2 1</b>	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>66.560.798.393,00</b>	<b>57.866.312.717,30</b>	<b>(8.694.485.675,70)</b>	<b>86,94</b>
<b>2 1 1</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>43.174.324.789,00</b>	<b>36.737.618.808,30</b>	<b>(6.436.705.980,70)</b>	<b>85,09</b>
2 1 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	37.063.889.089,00	31.767.147.021,00	(5.296.742.068,00)	85,71
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.423.700,00	3.229.466.871,30	(776.956.828,70)	80,61
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	609.501.000,00	555.994.400,00	(53.506.600,00)	91,22
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan	1.494.511.000,00	1.185.010.516,00	(309.500.484,00)	79,29
<b>2 1 2</b>	<b>Belanja Operasi&amp;Pemeliharaan</b>	<b>20.004.284.464,00</b>	<b>17.833.888.429,00</b>	<b>(2.170.396.035,00)</b>	<b>89,15</b>
2 1 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	8.330.055.403,00	7.382.841.619,00	(947.213.784,00)	88,63
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	10.082.088.061,00	9.024.797.360,00	(1.057.290.701,00)	89,51
2 1 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.576.068.500,00	1.417.385.450,00	(158.683.050,00)	89,93
2 1 2 4	Belanja Pemeliharaan	16.072.500,00	8.864.000,00	(7.208.500,00)	55,15
<b>2 1 3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.382.189.140,00</b>	<b>3.294.805.480,00</b>	<b>(87.383.660,00)</b>	<b>97,42</b>
<b>2 2</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>543.281.353.031,00</b>	<b>438.902.664.335,00</b>	<b>(104.378.688.696,00)</b>	<b>80,79</b>
<b>2 2 1</b>	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>289.580.297.710,00</b>	<b>238.144.704.482,00</b>	<b>(51.435.593.228,00)</b>	<b>82,24</b>
2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	261.975.666.103,00	214.869.182.552,00	(47.106.483.551,00)	82,02
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	15.677.700.567,00	12.813.292.257,00	(2.864.408.310,00)	81,73
2 2 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.830.242.500,00	1.446.611.940,00	(383.630.560,00)	79,04
2 2 1 4	Belanja Pemeliharaan	10.096.688.540,00	9.015.617.733,00	(1.081.070.807,00)	89,29
<b>2 2 2</b>	<b>Belanja Operasi&amp;Pemeliharaan</b>	<b>63.431.326.526,00</b>	<b>55.504.444.118,00</b>	<b>(7.926.882.408,00)</b>	<b>87,50</b>
2 2 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	12.353.059.790,00	11.100.808.620,00	(1.252.251.170,00)	89,86
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.269.612.316,00	30.016.452.465,00	(4.253.159.851,00)	87,59
2 2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	7.475.538.000,00	5.616.662.610,00	(1.858.875.390,00)	75,13
2 2 2 4	Belanja Pemeliharaan	9.333.116.420,00	8.770.520.423,00	(562.595.997,00)	93,97
<b>2 2 3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>100.031.802.300,00</b>	<b>76.107.251.594,00</b>	<b>(23.924.550.706,00)</b>	<b>76,08</b>
<b>2 3</b>	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	<b>64.356.241.495,00</b>	<b>59.411.518.162,00</b>	<b>(4.944.723.333,00)</b>	<b>92,32</b>
<b>2 4</b>	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	<b>25.881.685.000,00</b>	<b>9.734.745.979,00</b>	<b>(16.146.939.021,00)</b>	<b>37,61</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>609.842.151.424,00</b>	<b>496.768.977.052,30</b>	<b>(113.073.174.371,70)</b>	<b>81,46</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(84.517.182.165,00)</b>	<b>22.253.260.269,34</b>	<b>106.770.442.434,34</b>	<b>(26,33)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3 1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>94.903.970.898,00</b>	<b>76.983.970.898,15</b>	<b>(17.919.999.999,85)</b>	<b>81,12</b>
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	76.983.970.898,00	76.983.970.898,15	0,15	100,00
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	17.920.000.000,00	-	(17.920.000.000,00)	-
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	<b>94.903.970.898,00</b>	<b>76.983.970.898,15</b>	<b>(17.919.999.999,85)</b>	<b>81,12</b>
<b>3 2</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>10.386.788.733,00</b>	<b>99.237.231.167,49</b>	<b>88.850.442.434,49</b>	<b>955,42</b>
3 2 1	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal	5.093.766.520,00	5.083.766.520,00	(10.000.000,00)	99,80
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	2.492.258.116,00	2.245.004.321,52	(247.253.794,48)	90,08

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
3 2 4	Pemberian Piutang Daerah	1.375.000.000,00	1.298.000.000,00	(77.000.000,00)	94,40
3 2 5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006	1.425.764.097,00	90.610.460.325,97	89.184.696.228,97	6.355,22
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	<b>10.386.788.733,00</b>	<b>99.237.231.167,49</b>	<b>97.811.467.070,48</b>	<b>955,42</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>84.517.182.165,00</b>	<b>(22.253.260.269,34)</b>	<b>106.770.442.434,34</b>	<b>(26,33)</b>
<b>3 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2006</b>	-	<b>90.610.460.325,97</b>	<b>90.610.460.325,97</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data sekunder Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.3  
Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2007.

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>595.089.751.971,00</b>	<b>615.648.852.480,31</b>	<b>20.559.100.509,31</b>	<b>103,45</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>104.162.882.000,00</b>	<b>114.098.350.942,31</b>	<b>9.935.468.942,31</b>	<b>109,54</b>
1 1 1	Pajak Daerah	49.274.000.000,00	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18
1 1 2	Retribusi Daerah	29.092.692.000,00	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36
1 1 3	Hasil Pengolaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000,00	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.996.685.000,00	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>442.088.480.671,00</b>	<b>442.076.980.938,00</b>	<b>(11.499.733,00)</b>	<b>100,00</b>
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442.088.480.671,00	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217,00	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)	94,24
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553.060.454,00	46.842.560.104,00	(66.396.020,00)	87,99
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-	100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-	100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
<b>1 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>48.838.389.300,00</b>	<b>59.473.520.600,00</b>	<b>10.635.131.300,00</b>	<b>121,78</b>
1 3 1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Pendapatan Lainnya	43.849.620.300,00	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00	121,29
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>595.089.751.971,00</b>	<b>615.648.852.480,31</b>	<b>20.559.100.509,31</b>	<b>103,45</b>

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>683.281.388.075,00</b>	<b>569.120.372.561,96</b>	<b>(114.161.015.513,04)</b>	<b>83,29</b>
<b>2 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>559.068.622.838,00</b>	<b>476.583.025.119,55</b>	<b>(82.485.597.718,45)</b>	<b>85,25</b>
2 1 1	Belanja Pegawai	392.723.577.238,00	332.205.140.033,00	(60.518.437.205,00)	84,59
2 1 2	Belanja Barang	102.454.936.051,00	85.667.260.473,00	(16.787.675.578,00)	83,61
2 1 3	Belanja Bunga	707.120.555,00	707.120.553,55	(1,45)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi	307.192.000,00	306.876.000,00	(316.000,00)	99,90
2 1 5	Belanja Hibah	-	-	-	-
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994,00	57.696.628.060,00	(5.179.168.934,00)	91,76
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>2 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.665.794.491,00</b>	<b>89.982.396.168,00</b>	<b>(10.683.398.323,00)</b>	<b>89,39</b>
2 2 1	Belanja Tanah	4.435.310.000,00	4.092.326.400,00	(342.983.600,00)	92,27
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.413.938.825,00	11.067.578.735,00	(1.346.360.090,00)	89,15
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.117.570.922,00	50.951.282.032,00	(8.166.288.890,00)	86,19
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.991.214.744,00	22.307.082.701,00	(684.132.043,00)	97,02
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.387.060.000,00	1.252.832.300,00	(134.227.700,00)	90,32
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	320.700.000,00	311.294.000,00	(9.406.000,00)	97,07
<b>2 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.546.970.746,00</b>	<b>2.554.951.274,41</b>	<b>(20.992.019.471,59)</b>	<b>10,85</b>
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746,00	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
<b>2 4</b>	<b>TRANSFER</b>	-	-	-	-
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>683.281.388.075,00</b>	<b>569.120.372.561,96</b>	<b>(114.161.015.513,04)</b>	<b>83,29</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(88.191.636.104,00)</b>	<b>46.528.479.918,35</b>	<b>134.720.116.022,35</b>	<b>(52,76)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>90.610.460.326,00</b>	<b>90.610.460.325,97</b>	<b>(0,03)</b>	<b>100,00</b>
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.610.460.326,00	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>90.610.460.326,00</b>	<b>90.610.460.325,97</b>	<b>(0,03)</b>	<b>100,00</b>
<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.418.824.222,00</b>	<b>2.370.824.221,52</b>	<b>(48.000.000,48)</b>	<b>98,02</b>
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	958.824.222,00	958.824.221,52	(0,48)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.460.000.000,00	1.412.000.000,00	(48.000.000,00)	96,71
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.418.824.222,00</b>	<b>2.370.824.221,52</b>	<b>(48.000.000,48)</b>	<b>98,02</b>

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Pembiayaan Neto	88.191.636.104,00	88.239.636.104,45	48.000.000,45	100,05
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2007	-	134.768.116.022,80	134.768.116.022,80	100,00

Sumber: Data sekunder Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.4

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2008.

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>696.352.512.005,00</b>	<b>720.252.933.347,72</b>	<b>23.900.421.342,72</b>	<b>103,43</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>116.895.236.051,00</b>	<b>132.431.571.514,72</b>	<b>15.536.335.463,72</b>	<b>113,29</b>
1 1 1	Pajak Daerah	59.343.591.000,00	62.452.770.490,00	3.109.179.490,00	105,24
1 1 2	Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	34.940.602.210,00	2.055.374.456,00	106,25
1 1 3	Hasil Pengolaan Daerah Yang Dipisahkan	8.454.823.854,00	8.454.823.854,45	0,45	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	26.583.374.960,27	10.371.781.517,27	163,98
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>501.554.429.866,00</b>	<b>509.881.382.862,00</b>	<b>8.326.952.996,00</b>	<b>101,66</b>
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	499.650.133.866,00	504.741.154.863,00	5.091.020.997,00	101,02
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	55.803.964.505,00	61.081.198.662,00	5.277.234.157,00	109,46
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350.939.361,00	164.724.201,00	(186.215.160,00)	46,94
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000,00	411.257.232.000,00	2.000,00	100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000,00	32.238.000.000,00	-	100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.904.296.000,00	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	269,93
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	1.904.296.000,00	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	269,93
<b>1 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>77.902.846.088,00</b>	<b>77.939.978.971,00</b>	<b>37.132.883,00</b>	<b>100,05</b>
1 3 1	Pendapatan Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	-	100,00
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	925.274.588,00	962.407.471,00	37.132.883,00	104,01
1 3 3	Pendapatan Lainnya	56.645.511.500,00	56.645.511.500,00	-	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>696.352.512.005,00</b>	<b>720.252.993.347,72</b>	<b>23.900.421.342,72</b>	<b>103,43</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>815.369.220.042,00</b>	<b>698.566.664.120,78</b>	<b>(116.802.555.921,22)</b>	<b>85,67</b>
<b>2 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>678.223.028.699,00</b>	<b>591.219.774.234,78</b>	<b>(87.003.254.464,22)</b>	<b>87,17</b>
2 1 1	Belanja Pegawai	484.182.361.180,00	428.171.470.769,60	(56.010.890.410,40)	88,43
2 1 2	Belanja Barang	109.285.272.225,00	90.700.730.290,14	(18.584.541.834,86)	82,99
2 1 3	Belanja Bunga	579.027.700,00	578.027.616,04	(83,96)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi	-	-	-	-



No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2 1 5	Belanja Hibah	28.216.140.900,00	22.180.860.900,00	(6.035.280.000,00)	78,61
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	55.960.226.694,00	49.587.684.559,00	(6.372.542.135,00)	88,61
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
<b>2 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>117.948.989.549,00</b>	<b>107.286.061.886,00</b>	<b>(10.662.927.663,00)</b>	<b>90,96</b>
2 2 1	Belanja Tanah	8.017.621.000,00	6.208.586.469,00	(1.809.034.531,00)	77,44
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.706.454.156,00	17.216.376.442,00	(1.490.077.714,00)	92,03
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	60.851.258.150,00	54.477.308.400,00	(6.373.949.750,00)	89,53
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.988.318.243,00	28.135.315.700,00	(853.002.543,00)	97,06
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.638.000,00	998.186.175,00	(79.451.825,00)	92,63
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	307.700.000	250.288.700,00	(57.411.300,00)	81,34
<b>2 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.197.201.794,00</b>	<b>60.828.000,00</b>	<b>(19.136.373.794,00)</b>	<b>0,32</b>
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	19.197.201.794,00	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32
<b>2 4</b>	<b>TRANSFER</b>	-	-	-	-
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>815.369.220.042,00</b>	<b>698.566.664.120,78</b>	<b>(116.802.555.921,22)</b>	<b>85,67</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(119.016.708.037,00)</b>	<b>21.686.269.226,94</b>	<b>140.702.977.263,94</b>	<b>(18,22)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>133.446.070.337,00</b>	<b>134.894.008.134,80</b>	<b>1.447.937.797,80</b>	<b>101,09</b>
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	133.296.402.337,00	134.768.116.022,80	1.471.713.685,80	101,10
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	149.668.000,00	125.892.112,00	(23.775.888,00)	84,11
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>133.446.070.337,00</b>	<b>134.894.008.134,80</b>	<b>1.447.937.797,80</b>	<b>101,09</b>
<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.429.362.300,00</b>	<b>12.982.962.288,20</b>	<b>(1.446.400.011,80)</b>	<b>89,98</b>
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.446.000.000,00	12.000.000.000,00	(1.446.000.000,00)	89,25
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	983.362.300,00	982.962.288,20	(400.011,80)	99,96
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>14.429.362.300,00</b>	<b>12.982.962.288,20</b>	<b>(1.446.400.011,80)</b>	<b>89,98</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>119.016.708.037,00</b>	<b>121.911.045.846,60</b>	<b>2.894.337.809,60</b>	<b>102,43</b>
<b>3 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2008</b>	-	<b>143.597.315.073,54</b>	<b>143.597.315.073,54</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data sekunder Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.5

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009.

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>728.820.780.075,00</b>	<b>749.989.016.366,95</b>	<b>21.168.236.291,95</b>	<b>102,90</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>145.446.398.106,00</b>	<b>161.473.838.209,95</b>	<b>16.027.440.103,95</b>	<b>111,02</b>
1 1 1	Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29
1 1 2	Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04
1 1 3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>569.117.156.696,00</b>	<b>574.257.953.157,00</b>	<b>5.140.796.188,00</b>	<b>100,90</b>
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	522.128.489.869,00	517.366.876.957,00	(4.761.612.912,00)	99,09
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	71.042.879.869,00	66.433.124.320,00	(4.609.755.549,00)	93,51
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	249.280.000,00	97.422.637,00	(151.857.363,00)	39,08
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1.165,62
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	929.264.600,00	1.010.123.400,00	80.858.800,00	108,70
1 2 2 3	Dana Tunjangan Pendidikan	-	9.821.550.000,00	9.821.550.000,00	
1 2 3	Transfer Pemerintah Provinsi	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00
1 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00
1 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<b>1 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>14.257.225.000,00</b>	<b>14.257.225.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1 3 1	Pendapatan Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Pendapatan Lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>728.820.780.075,00</b>	<b>749.989.016.366,95</b>	<b>21.168.236.291,95</b>	<b>102,90</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>860.974.765.851,00</b>	<b>783.851.692.759,66</b>	<b>(77.123.073.091,34)</b>	<b>91,04</b>
<b>2 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>753.429.913.544,00</b>	<b>695.351.653.000,86</b>	<b>(58.078.260.543,14)</b>	<b>92,29</b>
2 1 1	Belanja Pegawai	490.280.089.021,00	461.189.796.523,00	(29.090.292.498,00)	94,07
2 1 2	Belanja Barang	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28
2 1 3	Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 5	Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>2 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>94.586.338.685,00</b>	<b>86.735.745.635,80</b>	<b>(7.850.593.049,20)</b>	<b>91,70</b>
2 2 1	Belanja Tanah	2.778.225.000,00	2.466.745.100,00	(311.479.900,00)	88,79
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.282.226.305,00	16.396.567.920,00	(1.885.658.385,00)	89,69
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	44.308.444.680,00	40.267.206.365,80	(4.041.238.314,20)	90,88
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.360.646.700,00	24.566.338.000,00	(794.308.700,00)	96,87
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.378.796.000,00	1.972.323.000,00	(406.473.000,00)	82,91
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	1.478.000.000,00	1.066.565.250,00	(411.434.750,00)	72,16
<b>2 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.958.513.622,00</b>	<b>1.764.294.123,00</b>	<b>(11.194.219.499,00)</b>	<b>13,61</b>
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61
<b>2 4</b>	<b>TRANSFER</b>				
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>860.974.765.851,00</b>	<b>783.851.692.759,66</b>	<b>(77.123.073.091,34)</b>	<b>91,04</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(132.153.985.776,00)</b>	<b>(33.862.676.392,71)</b>	<b>98.291.309.383,29</b>	<b>25,62</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>143.847.315.073,00</b>	<b>143.752.738.194,54</b>	<b>(94.576.878,46)</b>	<b>99,93</b>
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.597.315.073,00	143.562.038.073,54	(35.276.999,46)	99,98
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>143.847.315.073,00</b>	<b>143.752.738.194,54</b>	<b>(94.576.878,46)</b>	<b>99,93</b>
<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.693.329.297,00</b>	<b>11.693.328.451,86</b>	<b>(845,14)</b>	<b>100,00</b>
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.693.329.297,00</b>	<b>11.693.328.451,86</b>	<b>(845,14)</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>132.153.985.776,00</b>	<b>132.059.409.742,68</b>	<b>(94.576.033,32)</b>	<b>100,00</b>
<b>3 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2009</b>	-	<b>98.196.733.349,97</b>	<b>98.196.733.349,97</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data sekunder Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.1, tabel 5.2, tabel 5.3, tabel 5.4, dan tabel 5.5 menggambarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009. Realisasi pendapatan dan belanja dari tahun 2005 – 2009 mengalami peningkatan.

Realisasi pendapatan dari tahun 2007 – 2009 mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan tahun 2007 sebesar Rp615.648.852.480,31, realisasi pendapatan tahun 2008 sebesar Rp720.252.933.347,72, dan realisasi pendapatan tahun 2009 sebesar Rp749.989.016.366,95. Realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp615.648.852.480,31 dan realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp749.989.016.366,95. Peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2007, 2008, dan 2009 ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar 16,07%, realisasi pendapatan transfer meningkat sebesar 15,34% dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 31,05%. Pada tahun 2009 realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar 21,93% dan realisasi pendapatan transfer meningkat sebesar 12,63%.

Realisasi belanja dari tahun 2007 – 2009 mengalami peningkatan. Realisasi belanja tahun 2007 sebesar Rp569.120.372.561,96, realisasi belanja tahun 2008 sebesar Rp698.566.664.120,78, dan realisasi belanja tahun 2009 sebesar Rp783.851.692.759,66. Realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp569.120.372.561,96 dan realisasi belanja tertinggi terjadi

pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp783.851.692.759,66. Peningkatan realisasi belanja pada tahun 2007, 2008, dan 2009 ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2008 realisasi belanja operasi meningkat sebesar 24,05%, dan realisasi belanja modal meningkat sebesar 19,23%. Pada tahun 2009 realisasi belanja operasional meningkat sebesar 17,61% dan realisasi belanja tidak terduga sebesar 2.800,46%.

## **B. Analisis Data dan Pembahasan**

Perbedaan format laporan realisasi anggaran Pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 2005 dan 2006 dengan tahun 2007 – 2009 membuat penulis mengalami kesulitan dalam membandingkan beberapa pos yang mengalami perubahan akibat perbedaan format laporan realisasi anggaran Pemerintah kota Yogyakarta ini. Oleh karena itu penulis hanya melakukan pembahasan untuk tahun 2007 – 2009, akan tetapi untuk perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tetap dapat disajikan dari tahun 2005 – 2009.

Pengukuran *value for money* merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan *input* dengan *output*. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam

pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

#### 1. Pengukuran Ekonomis

Ukuran ekonomis mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya *input* (*cost of input*). Ukuran ekonomi berupa jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan apabila melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Kinerja suatu entitas dikatakan ekonomis apabila *input* lebih kecil dari *input value*, artinya bahwa dana realisasi belanja yang digunakan lebih kecil dari dana belanja yang dianggarkan.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Input Value* : Anggaran Belanja

Kriteria ekonomis adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan ekonomis berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan tidak ekonomis.

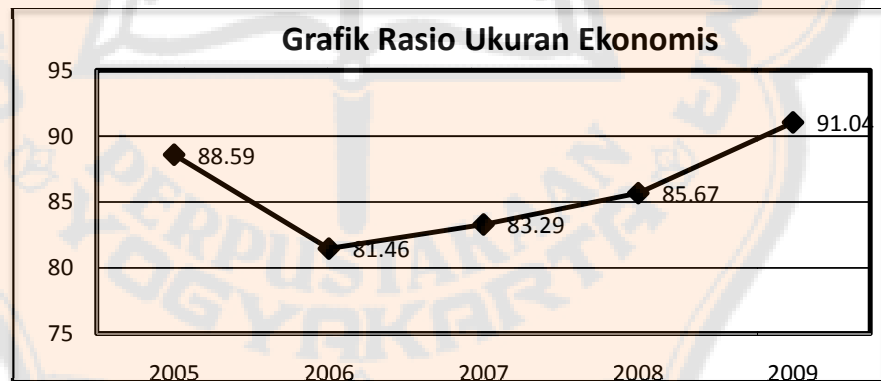
Berikut ini contoh perhitungan ukuran ekonomis untuk laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005:

$$\text{Ukuran Ekonomis} = \frac{\text{Rp}399.244.605.370,00}{\text{Rp}450.650.006.904,00} \times 100\% = 88,59\%$$

Tabel 5.6  
Perhitungan Ukuran Ekonomis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

No.	Tahun Anggaran	Input (Realisasi Belanja)	Input Value (Anggaran Belanja)	Rasio Ukuran Ekonomis (%)
1.	2005	399.244.605.370,00	450.650.006.904,00	88,59
2.	2006	496.768.977.052,30	609.842.151.424,00	81,46
3.	2007	569.120.372.561,96	683.281.388.075,00	83,29
4.	2008	698.566.664.120,78	815.369.220.042,00	85,67
5.	2009	783.851.692.759,66	860.974.765.851,00	91,04

Rasio ukuran ekonomis pada tabel 5.6 di atas dapat dilihat pada grafik 5.1 berikut ini.



Grafik 5.1

Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

Tabel 5.6 dan Grafik 5.1 menunjukkan rasio ukuran ekonomis Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009. Rasio ukuran ekonomis Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 berada diantara 81,46% – 91,04%. Dengan tingkat rasio ukuran ekonomi

terendah berada pada tahun 2006 yaitu 81,46% dan rasio ukuran ekonomis tertinggi berada pada tahun 2009 yaitu 91,04%.

Pada tahun 2007 rasio ukuran ekonomis Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 83,29%. Tahun 2008 rasio ukuran ekonomis naik sebesar 2,38% menjadi 85,67%. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya rasio belanja operasi dan belanja modal. Tahun 2009 rasio ekonomis naik sebesar 5,37% menjadi 91,04%. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya rasio belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Kenaikan rasio ukuran ekonomis pada tahun 2007 – 2009 menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta memburuk.

Berdasarkan rasio ukuran ekonomis tersebut kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 dinilai ekonomis karena rasio ekonomis berada di bawah 100%, dimana dana realisasi belanja lebih kecil dari dana anggaran belanjanya.

## 2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur biaya *output* (*cost of output*). Ukuran efisiensi didasarkan pada dua ukuran, yaitu *input* dan *output*. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output*. Kinerja suatu entitas dikatakan efisien apabila *output* lebih besar dari *input*, artinya bahwa dana realisasi pendapatan yang diperoleh lebih besar dari dana realisasi belanja yang digunakan.



$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : Realisasi Belanja

*Output* : Realisasi Pendapatan

Kriteria efisiensi adalah:

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan efisien.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan tidak efisien.

Berikut ini contoh perhitungan ukuran efisiensi untuk laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005:

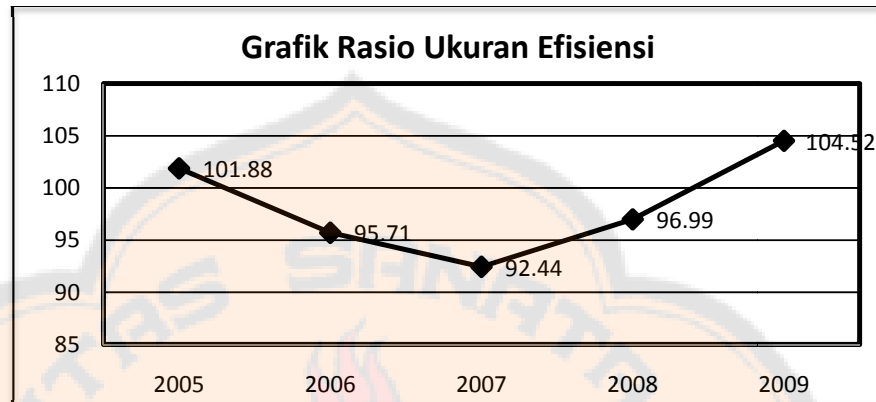
$$\text{Ukuran Efisiensi} = \frac{\text{Rp}399.244.605.370,00}{\text{Rp}391.886.902.046,24} \times 100\% = 101,88$$

Tabel 5.7

Perhitungan Ukuran Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

No.	Tahun Anggaran	<i>Input</i> (Realisasi belanja)	<i>Output</i> (Realisasi Pendapatan)	Rasio Ukuran Efisiensi (%)
1.	2005	399.244.605.370,00	391.886.902.046,24	101,88
2.	2006	496.768.977.052,30	519.022.237.321,64	95,71
3.	2007	569.120.372.561,96	615.648.852.480,31	92,44
4.	2008	698.566.664.120,78	720.252.933.347,72	96,99
5.	2009	783.851.692.759,66	749.989.016.366,95	104,52

Rasio ukuran efisiensi pada tabel 5.7 di atas dapat dilihat pada grafik 5.2 berikut ini.



Grafik 5.2  
Rasio Ukuran Efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

Tabel 5.7 dan grafik 5.2 menunjukkan rasio ukuran efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009. Rasio ukuran efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 berada diantara 92,44% – 104,52%. Dengan tingkat rasio ukuran efisiensi terendah berada pada tahun 2007 yaitu 92,44% dan rasio ukuran efisiensi tertinggi berada pada tahun 2009 yaitu 104,52%.

Pada tahun 2007 rasio ukuran efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 92,44%. Tahun 2008 rasio ukuran efisiensi naik sebesar 4,55% menjadi 96,99%. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya rasio pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja operasi dan belanja modal. Tahun 2009 rasio ukuran efisiensi naik sebesar 7,53% menjadi 104,52%. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya rasio belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Kenaikan rasio ukuran

efisiensi pada tahun 2008 dan 2009 menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta memburuk.

Berdasarkan rasio ukuran efisiensi tersebut kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 dan 2008 dinilai efisien karena rasio ukuran efisiensi berada di bawah 100%, dimana dana realisasi belanja lebih kecil dari dana realisasi pendapatannya sedangkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2009 dinilai tidak efisien karena rasio ukuran efisiensi berada di atas 100%, dimana dana realisasi belanja lebih besar dari dana realisasi pendapatannya.

### 3. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu kegiatan dikaitkan dengan *outcomenya* (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur *outcome*. Kinerja suatu entitas dikatakan efektif apabila *outcome* lebih besar dari *output*, artinya bahwa dana realisasi pendapatan lebih besar dari dana pendapatan yang dianggarkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi Pendapatan

*Output* : Anggaran Pendapatan

Kriteria efektivitas adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan efektifitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ), maka kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan efektif.

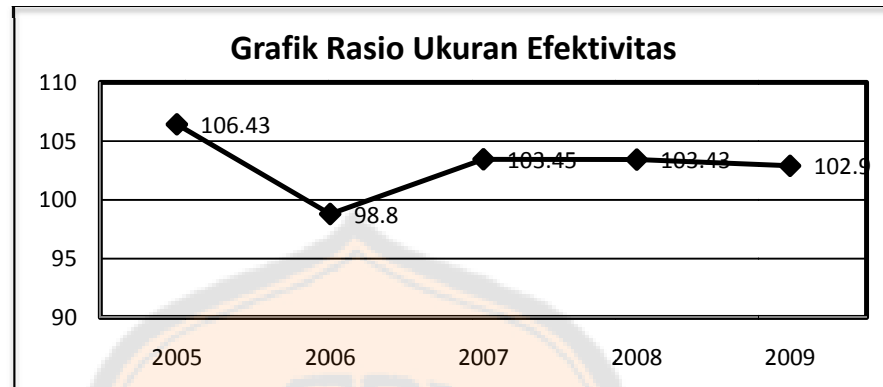
Berikut ini contoh perhitungan ukuran efektivitas untuk laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005:

$$\text{Ukuran Efektivitas} = \frac{\text{Rp}391.886.902.046,24}{\text{Rp}368.226.057.000,00} \times 100\% = 106,43$$

Tabel 5.8  
Perhitungan Ukuran Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

No.	Tahun Anggaran	Outcome (Realisasi Pendapatan)	Output (Anggaran Pendapatan)	Rasio Ukuran Efektivitas (%)
1.	2005	391.886.902.046,24	368.226.057.000,00	106,43
2.	2006	519.022.237.321,64	525.324.969.259,00	98,80
3.	2007	615.648.852.480,31	595.089.751.971,00	103,45
4.	2008	720.252.933.347,72	696.352.512.005,00	103,43
5.	2009	749.989.016.366,95	728.820.780.075,00	102,90

Rasio ukuran efektivitas pada tabel 5.8 di atas dapat dilihat pada grafik 5.3 berikut ini.



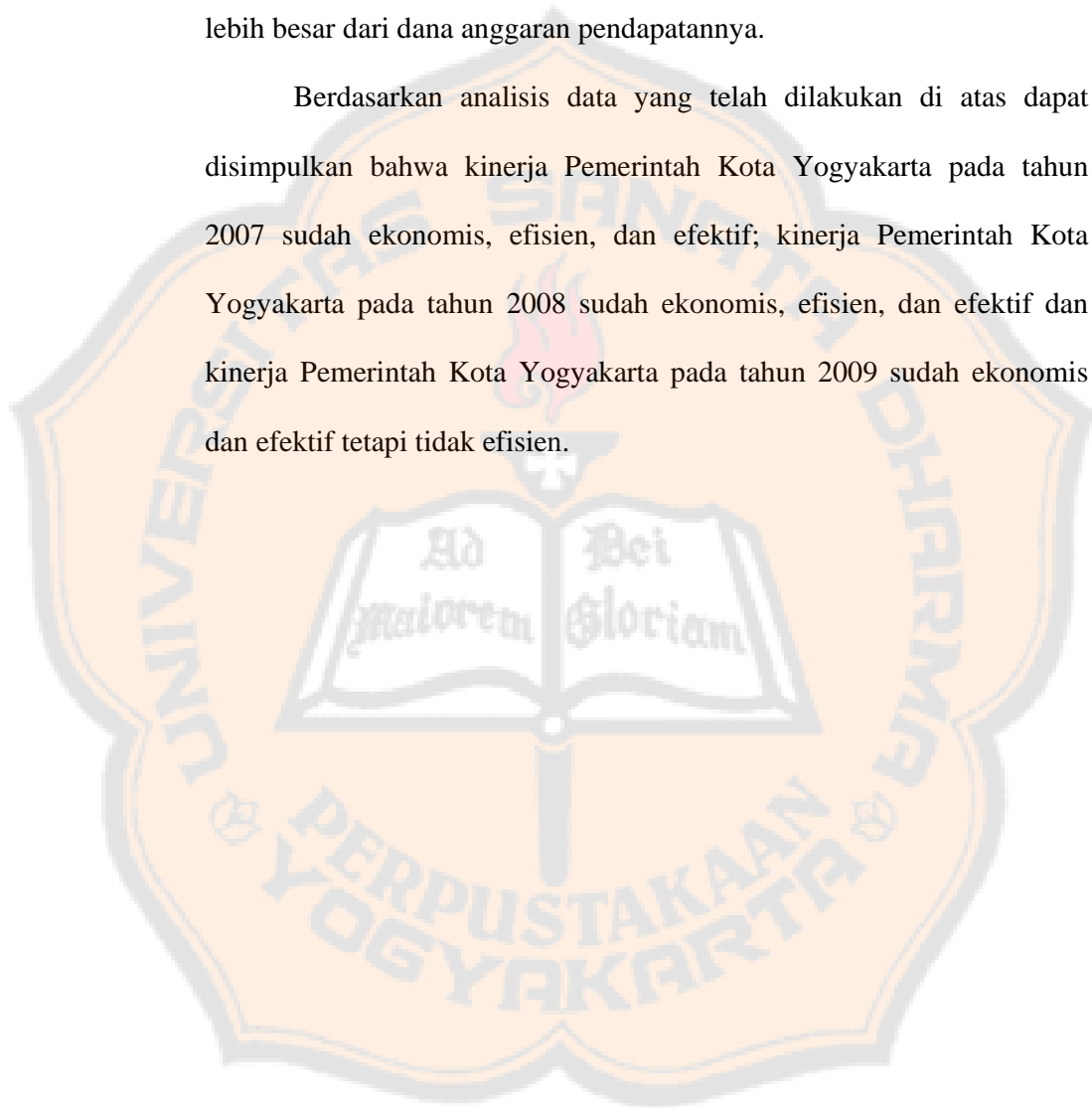
Grafik 5.3  
Rasio Ukuran Efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

Tabel 5.8 dan grafik 5.3 menunjukkan rasio ukuran efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2009. Rasio ukuran efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 – 2009 berada diantara 98,80% – 106,43%. Dengan tingkat rasio ukuran efektivitas terendah berada pada tahun 2006 yaitu 98,80% dan rasio ukuran efektivitas tertinggi berada pada tahun 2005 yaitu 106,43%.

Pada tahun 2007 rasio ukuran efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 103,45%. Tahun 2008 rasio ukuran efektivitas turun sebesar 0,02% menjadi 103,43%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya rasio lain-lain pendapatan yang sah. Tahun 2009 rasio ukuran efektivitas turun sebesar 0,53% menjadi 102,90%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya rasio pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penurunan rasio ukuran efektivitas pada tahun 2008 dan 2009 menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta memburuk.

Berdasarkan rasio ukuran efektivitas tersebut kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007, 2008 dan 2009 dinilai efektif karena rasio ukuran efektivitas berada di atas 100%, dimana dana realisasi pendapatan lebih besar dari dana anggaran pendapatannya.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sudah ekonomis, efisien, dan efektif; kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sudah ekonomis, efisien, dan efektif dan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 sudah ekonomis dan efektif tetapi tidak efisien.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengukuran Ekonomis

Berdasarkan pembahasan pada bab V maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007, 2008, dan 2009 sudah ekonomis. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ukuran ekonomis pada tahun 2007 sebesar 83,29%, tahun 2008 sebesar 85,67%, dan 2009 sebesar 91,04%, dimana ketiga tahun tersebut menghasilkan rasio ukuran ekonomis lebih kecil dari 100% yang berarti semakin kecil rasio ukuran ekonomis semakin ekonomis kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

##### 2. Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan pembahasan pada bab V maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 dan 2008 sudah efisien tetapi tahun 2009 menjadi tidak efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ukuran efisiensi pada tahun 2007 sebesar 92,44% dan 2008 sebesar 96,99%, dimana kedua tahun ini menghasilkan rasio ukuran efisiensi lebih kecil dari 100% yang berarti semakin kecil rasio ukuran efisiensi semakin efisien kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan rasio ukuran efisiensi tahun 2009 sebesar 104,52%, dimana tahun 2009 ini menghasilkan rasio ukuran efisiensi lebih besar dari 100%

yang berarti semakin besar rasio ukuran efisiensi semakin tidak efisien kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

### 3. Pengukuran Efektivitas

Berdasarkan pembahasan pada bab V maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007, 2008, dan 2009 sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ukuran efektivitas pada tahun 2007 sebesar 103,45%, tahun 2008 sebesar 103,43%, dan 2009 sebesar 102,90%, dimana ketiga tahun tersebut menghasilkan rasio ukuran efektivitas lebih besar dari 100% yang berarti semakin besar rasio ukuran efektivitas semakin efektif kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

### 4. Hasil Pengukuran Pertahun

Pada tahun 2007 kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ekonomis, efisien, dan efektif; tahun 2008 kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ekonomis, efisien, dan efektif dan tahun 2009 kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ekonomis dan efektif tetapi tidak efisien.

## B. Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini penulis tidak dapat mengetahui tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga untuk pengukuran ekonomis diasumsikan seluruh kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta terlaksana dengan baik.
2. Pada penelitian ini penulis mengambil data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2005 – 2009, dari data ini dapat dilakukan pengukuran



ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas, namun dalam pembahasan penulis hanya dapat melakukan pembahasan untuk laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2009 karena format laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta pada pos belanja pada tahun 2005 dan 2006 berbeda dengan tahun 2007 – 2009. Perbedaan ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### **C. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
  - a. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2009 sudah ekonomis maka diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkannya lagi pada tahun-tahun selanjutnya.
  - b. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 dan 2008 sudah efisien maka diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkannya lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Namun pada tahun 2009 kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tidak efisien maka diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperbaiki kinerjanya sehingga menjadi efisien.
  - c. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2009 sudah efektif maka diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat

mempertahankan atau bahkan meningkatkannya lagi pada tahun-tahun selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Yang Lain

- a. Untuk dapat mengetahui seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada satu instansi Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat diketahui secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan instansi tersebut.
- b. Untuk dapat menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian sebaiknya sebelum melakukan penelitian dipastikan terlebih dahulu semua data yang akan dicari memiliki format yang sama dan dapat diperbandingkan sehingga dapat digunakan dalam pembahasan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, Sigit. 2007. *Pengukuran Kinerja Proyek Pembangunan Jalan Dengan Pendekatan Value for Money, studi kasus pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Bina Marga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 *tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2006 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 *tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006*.

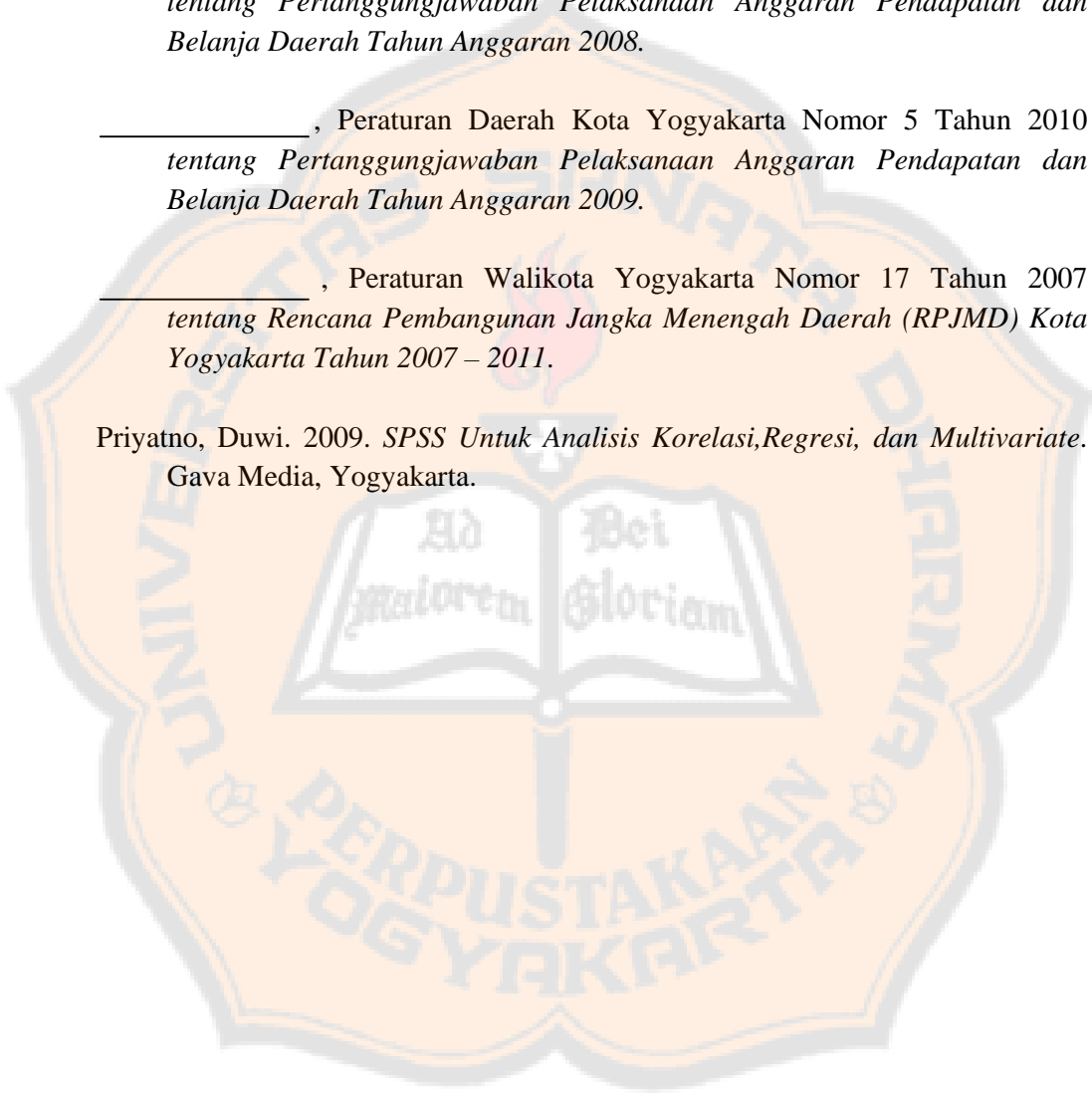
\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011*.

Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media, Yogyakarta.





# LAMPIRAN



**LAMPIRAN I : LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PEMERINTAH KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2005 – 2009**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 JULI 2008

I  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1. 1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 84.335.352.000,00	Rp 89.196.416.784,70	105,76
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 43.365.000.000,00	Rp 46.106.723.374,00	106,32
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 23.122.648.000,00	Rp 22.797.438.571,50	98,59
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.651.516.000,00	Rp 6.651.534.800,72	100,00
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.196.188.000,00	Rp 13.640.720.038,48	121,83
1. 2	<b>Dana Perimbangan</b>	Rp 268.347.705.000,00	Rp 289.257.620.761,54	107,79
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 32.791.705.000,00	Rp 39.446.429.477,00	120,29
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 201.231.000.000,00	Rp 201.231.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6.600.000.000,00	Rp 6.600.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 27.725.000.000,00	Rp 41.980.191.284,54	151,42
1. 3	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	Rp 15.543.000.000,00	Rp 13.432.864.500,00	86,42
1. 3 1 02	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 11.943.000.000,00	Rp 11.943.000.000,00	100,00
1. 3 1 04	Hibah	Rp 3.600.000.000,00	Rp 1.489.864.500,00	41,39
<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>		Rp 368.226.057.000,00	Rp 391.886.902.046,24	106,43

- 2 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA</b>			
1.	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 70.775.136.313,00	Rp 64.390.925.069,82	90,98
2.1.1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 31.216.908.010,00	Rp 28.980.600.331,82	92,84
2.1.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.218.096.337,00	Rp 24.350.880.584,30	92,88
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.231.814.453,00	Rp 3.058.801.526,52	94,65
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 854.373.000,00	Rp 801.593.680,00	93,82
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 912.624.220,00	Rp 769.324.541,00	84,30
2.1.2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 23.553.179.103,00	Rp 20.844.064.912,00	88,50
2.1.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.577.330.250,00	Rp 5.951.909.400,00	90,49
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.315.903.453,00	Rp 12.634.703.372,00	88,26
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.161.673.000,00	Rp 1.841.455.690,00	85,19
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 498.272.400,00	Rp 415.996.450,00	83,49
2.1.3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 16.005.049.200,00	Rp 14.566.259.826,00	91,01
2.2.	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 379.874.870.591,00	Rp 334.853.680.300,63	88,15
2.2.1.	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 206.850.889.421,00	Rp 188.968.325.856,00	91,35
2.2.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 182.842.291.930,00	Rp 168.033.445.090,00	91,90
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.367.006.461,00	Rp 13.742.583.438,00	83,97
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.918.786.000,00	Rp 1.813.068.550,00	94,49
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 5.722.805.030,00	Rp 5.379.228.778,00	94,00
2.2.2.	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 46.963.795.025,00	Rp 43.301.882.300,00	92,20
2.2.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 9.031.819.490,00	Rp 8.479.043.400,00	93,88
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.977.871.135,00	Rp 22.051.546.267,00	91,97
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.771.235.000,00	Rp 4.212.346.690,00	88,29
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.182.869.400,00	Rp 8.558.945.943,00	93,21
2.2.3.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 61.189.780.925,00	Rp 55.621.387.991,93	90,90
2.3.	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 47.870.405.220,00	Rp 45.118.547.802,70	94,25
2.4.	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 17.000.000.000,00	Rp 1.843.536.350,00	10,84
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 450.650.006.904,00	Rp 399.244.605.370,45	88,59
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (82.423.949.904,00)	Rp (7.357.703.324,21)	8,93



- 3 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PEMBIAYAAN</b>				
1	<b>Penerimaan Daerah</b>			
1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 72.622.268.370,00	Rp 73.659.073.376,51	101,43
1 2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 19.036.041.445,00	Rp 19.036.041.445,00	100,00
1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
1 5	Hibah	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	Rp 91.658.309.815,00	Rp 92.695.114.821,51	101,13
2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
2 2	Penyertaan Modal	Rp 6.446.042.500,00	Rp 6.446.041.672,80	100,00
2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 1.032.600.000,00	Rp 1.032.398.926,35	99,98
2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2005	Rp 880.717.411,00	Rp 76.983.970.898,15	8.741,05
2 5	Pemberian Piutang Daerah	Rp 875.000.000,00	Rp 875.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	Rp 9.234.359.911,00	Rp 85.337.411.497,30	924,13
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp 82.423.949.904,00	Rp 7.357.703.324,21	8,93

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

CATATAN :

SILPA Tahun lalu terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 72.622.268.370,51
2. SILPA RSUD tahun 2004 sebesar Rp. 1.036.805.006,00

Rp. 73.659.073.376,51

SILPA Tahun 2005 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 75.604.476.512,15
2. SILPA RSUD tahun 2005 sebesar Rp. 1.379.494.388,00

Rp. 76.983.970.898,15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2007

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2006  
(AUDITED)**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN</b>			
1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp 95.257.494.000,00	Rp 96.419.456.304,52	101,22
1.1	<b>Pajak Daerah</b>	Rp 42.678.850.000,00	Rp 43.997.150.025,00	103,09
1.1.1	Retribusi Daerah	Rp 25.028.663.530,00	Rp 24.704.781.396,00	98,71
1.1.2	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.885.906.000,00	Rp 7.722.505.202,62	112,15
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 20.664.074.470,00	Rp 19.995.019.680,90	96,76
1.1.4	<b>Dana Perimbangan</b>	Rp 403.865.122.259,00	Rp 397.150.853.946,12	98,34
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	Rp 28.890.203.091,00	Rp 40.145.140.985,00	138,96
1.2.1	Dana Alokasi Umum	Rp 316.832.000.000,00	Rp 316.832.000.000,00	100,00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	Rp 4.800.000.000,00	Rp 4.800.000.000,00	100,00
1.2.3	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 53.342.919.168,00	Rp 35.373.712.961,12	66,31
1.2.4	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	Rp 26.202.353.000,00	Rp 25.451.927.071,00	97,14
1.3	<b>Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah</b>	Rp -	Rp -	0,00
1.3.1	Dana penyesuain Ad Hoc	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	100,00
1.3.1.02	Hibah	Rp 11.202.353.000,00	Rp 10.451.927.071,00	93,30
1.3.1.03	<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>	Rp 525.324.969.259,00	Rp 519.022.237.321,64	98,80

- 2 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>APARATUR DAERAH</b>	Rp 66.560.798.393,00	Rp 57.866.312.717,30	86,94
2.1.1	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 43.174.324.789,00	Rp 36.737.618.808,30	85,09
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 37.063.889.089,00	Rp 31.767.147.021,00	85,71
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.006.423.700,00	Rp 3.229.466.871,30	80,61
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 609.501.000,00	Rp 555.994.400,00	91,22
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.494.511.000,00	Rp 1.185.010.516,00	79,29
2.1.2	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 20.004.284.464,00	Rp 17.833.888.429,00	89,15
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 8.330.055.403,00	Rp 7.382.841.619,00	88,63
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.082.088.061,00	Rp 9.024.797.360,00	89,51
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.576.068.500,00	Rp 1.417.385.450,00	89,93
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 16.072.500,00	Rp 8.864.000,00	55,15
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	Rp 3.382.189.140,00	Rp 3.294.805.480,00	97,42
2.2	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp 543.281.353.031,00	Rp 438.902.664.335,00	80,79
2.2.1	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	Rp 289.580.297.710,00	Rp 238.144.704.482,00	82,24
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 261.975.666.103,00	Rp 214.869.182.552,00	82,02
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.677.700.567,00	Rp 12.813.292.257,00	81,73
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.830.242.500,00	Rp 1.446.611.940,00	79,04
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.096.688.540,00	Rp 9.015.617.733,00	89,29
2.2.2	<b>Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</b>	Rp 63.431.326.526,00	Rp 55.504.444.118,00	87,50
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 12.353.059.790,00	Rp 11.100.808.620,00	89,86
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 34.269.612.316,00	Rp 30.016.452.465,00	87,59
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 7.475.538.000,00	Rp 5.616.662.610,00	75,13
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.333.116.420,00	Rp 8.770.520.423,00	93,97
2.2.3	<b>Belanja Modal</b>	Rp 100.031.802.300,00	Rp 76.107.251.594,00	76,08
3	<b>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>	Rp 64.356.241.495,00	Rp 59.411.518.162,00	92,32
4	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>	Rp 25.881.685.000,00	Rp 9.734.745.979,00	37,61
	<b>JUMLAH BELANJA:</b>	Rp 609.842.151.424,00	Rp 496.768.977.052,30	81,46
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp (84.517.182.165,00)	Rp 22.253.260.269,34	(26,33)

- 3 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3 1	<b>Penerimaan Daerah</b>			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 76.983.970.898,00	Rp 76.983.970.898,15	100,00
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp 17.920.000.000,00	Rp -	0,00
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	Rp 94.903.970.898,00	Rp 76.983.970.898,15	81,12
3 2	<b>Pengeluaran Daerah</b>			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 5.093.766.520,00	Rp 5.083.766.520,00	99,80
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 2.492.258.116,00	Rp 2.245.004.321,52	90,08
3 2 4	Pemberian Piutang Daerah	Rp 1.375.000.000,00	Rp 1.298.000.000,00	94,40
3 2 5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006	Rp 1.425.764.097,00	Rp 90.610.460.325,97	6.355,22
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	Rp 10.386.788.733,00	Rp 99.237.231.167,49	955,42
	<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>	Rp 84.517.182.165,00	Rp (22.253.260.269,34)	Rp (26,33)

CATATAN :

1. SILPA Tahun Anggaran 2006 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 89.006.973.666,97

2. SILPA RSUD tahun 2006 sebesar Rp. 1.603.486.659,00

Rp. 90.610.460.325,97



PERPUSTAKA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 September 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>595.089.751.971</b>	<b>615.648.852.480,31</b>	<b>20.559.100.509,31</b>	<b>103,45</b>
1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	104.162.882.000	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31	109,54
1 1 1	Pajak Daerah	49.274.000.000	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18
1 1 2	Retribusi Daerah	29.092.692.000	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.996.685.000	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	442.088.480.671	442.076.980.938,00	(11.499.733,00)	100,00
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442.088.480.671	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)	94,24
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553.060.454	486.664.434,00	(66.396.020,00)	87,99
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000	365.042.000.000,00		100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000	26.788.000.000,00		100,00
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus				
1 2 2 2	Dana Penyesuaian		2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
1 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>48.838.389.300</b>	<b>59.473.520.600,00</b>	<b>10.635.131.300,00</b>	<b>121,78</b>
1 3 1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat				
1 3 3	Pendapatan lainnya	43.849.620.300	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00	121,29
2	<b>BELANJA</b>	<b>683.281.388.075</b>	<b>569.120.372.561,96</b>	<b>(114.161.015.513,04)</b>	<b>83,29</b>
2 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>559.068.622.838</b>	<b>476.583.025.119,55</b>	<b>(82.485.597.718,45)</b>	<b>85,25</b>
2 1 1	Belanja Pegawai	392.723.577.238	332.205.140.033,00	(60.518.437.205,00)	84,59
2 1 2	Belanja Barang	102.454.936.051	85.667.260.473,00	(16.787.675.578,00)	83,61
2 1 3	Belanja Bunga	707.120.555	707.120.553,55	(1,45)	100,00
2 1 4	Belanja Subsidi	307.192.000	306.876.000,00	(316.000,00)	99,90
2 1 5	Belanja Hibah				
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994	57.696.628.060,00	(5.179.168.934,00)	91,76
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan				
2 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.665.794.491</b>	<b>89.982.396.168,00</b>	<b>(10.683.398.323,00)</b>	<b>89,39</b>
2 2 1	Belanja Tanah	4.435.310.000	4.092.326.400,00	(342.983.600,00)	92,27
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.413.938.825	11.067.578.735,00	(1.346.360.090,00)	89,15
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.117.570.922	50.951.282.032,00	(8.166.288.890,00)	86,19
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.991.214.744	22.307.082.701,00	(684.132.043,00)	97,02
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.387.060.000	1.252.832.300,00	(134.227.700,00)	90,32
2 2 6	Belanja Aset Lainnya	320.700.000	311.294.000,00	(9.406.000,00)	97,07
2 3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.546.970.746</b>	<b>2.554.951.274,41</b>	<b>(20.992.019.471,59)</b>	<b>10,85</b>
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
2 4	<b>TRANSFER</b>				
2 4 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
2 4 2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2 4 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota				
	Surplus/(Defisit)	(88.191.636.104)	46.528.479.918,35	134.720.116.022,35	(52,76)

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	90.610.460.326	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90.610.460.326	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90.610.460.326	90.610.460.325,97	(0,03)	100,00
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2.418.824.222	2.370.824.221,52	(48.000.000,48)	98,02
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	958.824.222	958.824.221,52	(0,48)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.460.000.000	1.412.000.000,00	(48.000.000,00)	96,71
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.418.824.222	2.370.824.221,52	(48.000.000,48)	98,02
	Pembiayaan Netto	88.191.636.104	88.239.636.104,45	48.000.000,45	100,05
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	134.768.116.022,80	134.768.116.022,80	100,00

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2007 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 133.296.402.337,80
  2. SILPA RSUD tahun 2007 sebesar Rp. 982.964.058,00
  3. SILPA Taman Pintar tahun 2007 sebesar Rp. 488.749.627,00
- Rp. 134.768.116.022,80



LAMPIRAN I - PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 2009  
TANGGAL : 1 Agustus 2009




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>696.352.512.005</b>	<b>720.252.933.347,72</b>	<b>23.900.421.342,72</b>	<b>103,43</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>116.895.236.051</b>	<b>132.431.571.514,72</b>	<b>16.536.335.463,72</b>	<b>113,29</b>
1.1	Pejak Daerah	59.343.591.000,00	62.452.770.490,00	3.109.179.490,00	105,24
1.2	Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	34.940.602.210,00	2.055.374.456,00	106,25
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.454.823.854,00	8.454.823.854,45	0,45	100,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	26.583.374.960,27	10.371.781.517,27	163,98
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>501.554.429.866</b>	<b>509.881.382.862,00</b>	<b>8.326.952.996,00</b>	<b>101,66</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat, - Dana Perimbangan	499.650.133.866	504.741.154.863,00	5.091.020.997,00	101,02
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	55.803.964.505	61.081.136.662,00	5.277.234.157,00	109,46
2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	350.939.361	164.724.201,00	(186.215.160,00)	-46,94
2.1.3	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000	411.257.232.000,00	2.000,00	100,00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000	22.238.000.000,00	(10.000.000,00)	68,83
2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	270,00
2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
2.2.2	Dana Penyesuaian	1.904.296.000	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	169,88
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>77.902.846.088</b>	<b>77.939.978.971,00</b>	<b>37.132.883,00</b>	<b>100,05</b>
3.1	Pendapatan Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	-	100,00
3.2	Pendapatan Dana Darurat	925.274.588,00	962.407.471,00	37.132.883,00	104,01
3.3	Pendapatan lainnya	56.645.511.500,00	56.645.511.500,00	-	100,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>696.352.512.005</b>	<b>720.252.933.347,72</b>	<b>23.900.421.342,72</b>	<b>103,43</b>
	<b>BELANJA</b>	<b>815.369.220.042</b>	<b>698.566.664.120,78</b>	<b>(116.802.555.921,22)</b>	<b>85,67</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>678.223.028.899</b>	<b>591.219.774.234,78</b>	<b>(87.003.254.664,22)</b>	<b>87,17</b>
1.1	Belanja Pegawai	484.182.361.180	428.171.470.769,60	(56.010.890.410,40)	88,43
1.2	Belanja Barang	109.285.272.225	90.700.730.390,14	(18.584.541.834,86)	82,99
1.3	Belanja Bunga	579.027.700,00	579.027.616,04	(83,96)	100,00
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	28.216.140.900,00	22.180.860.900,00	(6.035.280.000,00)	78,61
1.6	Belanja Bantuan Sosial	55.960.226.694,00	49.587.684.559,00	(6.372.542.135,00)	88,61
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>117.948.989.549,00</b>	<b>107.286.061.886,00</b>	<b>(10.662.927.663,00)</b>	<b>90,96</b>
2.1	Belanja Tanah	8.017.621.000	6.208.586.469,00	(1.809.034.531,00)	77,44
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.706.454.156	17.216.376.442,00	(1.490.077.714,00)	92,03
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	60.851.258.150	54.477.308.490,00	(6.373.949.750,00)	89,53
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.988.318.243	28.135.315.700,00	(853.002.543,00)	97,06
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.638.000	998.186.175,00	(79.451.825,00)	92,63
2.6	Belanja Aset Lainnya	307.700.000	250.288.700,00	(57.411.300,00)	81,34
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.197.201.794</b>	<b>60.828.000,00</b>	<b>(19.136.373.794,00)</b>	<b>0,32</b>
3.1	Belanja Tidak Terduga	19.197.201.794	60.828.000,00	(19.136.373.794,00)	0,32
	<b>TRANSFER</b>				
4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>815.369.220.042</b>	<b>698.566.664.120,78</b>	<b>(116.802.555.921,22)</b>	<b>85,67</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(119.016.708.037)</b>	<b>21.686.269.226,94</b>	<b>140.702.977.263,94</b>	<b>(18,22)</b>

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	133.446.070.337	134.894.008.134,80	1.447.937.797,80	101,09
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	133.296.402.337	134.768.116.022,80	1.471.713.685,80	101,10
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	149.668.000	125.892.112,00	(23.775.888,00)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.446.070.337	134.894.008.134,80	1.447.937.797,80	101,09
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	14.429.362.300	12.982.962.288,20	(1.446.400.011,80)	89,98
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.446.000.000	12.000.000.000,00	(1.446.000.000,00)	
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	983.362.300	982.962.288,20	(400.011,80)	99,96
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.429.362.300	12.982.962.288,20	(1.446.400.011,80)	89,98
	Pembiayaan Netto	119.016.708.037	121.911.045.846,60	2.894.337.809,60	102,43
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		143.597.315.073,54	143.597.315.073,54	100,00

CATATAN:  
 SILPA Tahun Anggaran 2008 terdiri dari:  
 1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 140.035.854.240,54  
 2. SISA KAS RSUD tahun 2008 sebesar Rp. 1.445.974.938,00  
 3. SISA Kas Taman-Pintar tahun 2008 sebesar Rp. 2.115.485.895,00  
 Rp. 143.597.315.073,54



WALIKOTA YOGYAKARTA  
 HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 5 TAHUN 2010  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2010

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI APBD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008  
(AUDITED)

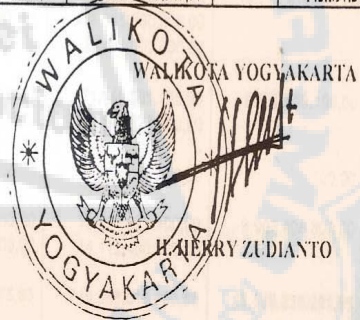
Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29%	62.452.770.490,00
Pendapatan Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04%	34.940.602.210,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58%	8.454.823.854,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11%	26.583.374.960,27
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>145.446.398.106,00</b>	<b>161.473.838.209,95</b>	<b>16.027.440.103,95</b>	<b>111,02%</b>	<b>132.431.571.514,72</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	71.042.879.869,00	66.433.124.320,00	(4.609.755.549,00)	93,51%	61.081.198.662,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	249.280.000,00	97.422.637,00	(151.857.363,00)	39,08%	164.724.201,00
Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00%	411.257.232.000,00
Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00%	32.238.000.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>522.128.489.869,00</b>	<b>517.366.876.957,00</b>	<b>(4.761.612.912,00)</b>	<b>99,09%</b>	<b>504.741.154.863,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	929.264.600,00	1.010.123.400,00	80.858.800,00	108,70%	1.904.295.999,00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	9.821.550.000,00	9.821.550.000,00	-	3.235.932.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>929.264.600,00</b>	<b>10.831.673.400,00</b>	<b>9.902.408.800,00</b>	<b>1165,62%</b>	<b>5.140.227.999,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00%	43.333.111.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>46.059.402.500,00</b>	<b>46.059.402.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.333.111.500,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>569.117.156.969,00</b>	<b>574.257.953.157,00</b>	<b>5.140.796.188,00</b>	<b>100,90%</b>	<b>553.214.494.362,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00%	20.332.060.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	962.407.471,00
Pendapatan Lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00%	13.312.400.000,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>14.257.225.000,00</b>	<b>14.257.225.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.606.867.471,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>728.820.780.075,00</b>	<b>749.989.016.366,95</b>	<b>21.168.236.291,95</b>	<b>102,90%</b>	<b>720.252.933.347,72</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	490.280.089.021,00	461.189.796.523,00	(29.090.292.498,00)	94,07%	428.171.470.769,60
Belanja Barang	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28%	90.700.730.390,14
Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00%	579.027.616,04
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60%	22.180.860.900,00
Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76%	49.587.684.559,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>753.429.913.544,00</b>	<b>695.351.653.000,86</b>	<b>(58.078.260.543,14)</b>	<b>92,29%</b>	<b>591.219.774.234,78</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	2.778.225.000,00	2.466.745.100,00	(311.479.900,00)	88,79%	6.208.586.469,00
Belanja Peralatan dan Mesin	18.282.226.305,00	16.396.567.920,00	(1.885.658.385,00)	89,69%	17.216.376.442,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.308.444.680,00	40.267.206.365,80	(4.041.238.314,20)	90,88%	54.477.308.400,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.360.646.700,00	24.566.338.000,00	(794.308.700,00)	96,87%	28.135.315.700,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.378.796.000,00	1.972.323.000,00	(406.473.000,00)	82,91%	998.186.175,00
Belanja Aset Lainnya	1.478.000.000,00	1.066.565.250,00	(411.434.750,00)	72,16%	250.288.700,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>94.586.338.685,00</b>	<b>86.735.745.635,80</b>	<b>(7.850.593.049,20)</b>	<b>91,70%</b>	<b>107.286.061.886,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61%	60.828.000,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>12.958.513.622,00</b>	<b>1.764.294.123,00</b>	<b>(11.194.219.499,00)</b>	<b>13,61%</b>	<b>60.828.000,00</b>
<b>TRANSFER</b>					
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>860.974.765.851,00</b>	<b>783.851.692.759,66</b>	<b>(77.123.073.091,34)</b>	<b>91,04%</b>	<b>698.566.664.120,78</b>

Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	25,62%	21.686.269.226,94
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan SILPA TA 2008	143.597.315.073,00	143.562.038.073,54	(35.276.999,46)	99,98%	134.768.116.022,80
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00%	-
Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80%	125.892.112,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>143.847.315.073,00</b>	<b>143.752.738.194,54</b>	<b>(94.576.878,46)</b>	<b>99,93%</b>	<b>134.894.008.134,80</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00%	12.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00%	982.962.288,20
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.693.329.297,00</b>	<b>11.693.328.451,86</b>	<b>(845,14)</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.982.962.288,20</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>132.153.985.776,00</b>	<b>132.059.409.742,68</b>	<b>(94.576.033,32)</b>	<b>99,93%</b>	<b>121.911.045.846,60</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2009</b>	-	<b>98.196.733.349,97</b>	<b>98.196.733.349,97</b>		<b>143.597.315.073,54</b>

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 89.406.806.073,97
  2. SISA KAS RSUD tahun 2009 sebesar Rp. 3.674.099.648,00
  3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2009 sebesar Rp. 5.115.827.628,00
- Rp. 98.196.733.349,97



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
(AUDITED)  
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>728.820.780.075,00</b>	<b>749.989.018.366,95</b>	<b>21.168.236.291,95</b>	<b>102,90</b>
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.446.398.106,00	161.473.838.209,95	16.027.440.103,95	111,02
1 1 1	Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,26
1 1 2	Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11
1 2	DANA PERIMBANGAN	522.128.489.869,00	517.366.876.967,00	(4.761.612.912,00)	99,09
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71.292.159.869,00	66.530.546.967,00	(4.761.612.912,00)	93,32
1 2 2	Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.245.892.100,00	71.148.301.200,00	9.902.409.100,00	116,17
1 3 1	Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1.165,62
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	728.820.780.075,00	749.989.018.366,95	21.168.236.291,95	102,90
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>860.974.785.851,00</b>	<b>783.851.692.759,66</b>	<b>(77.123.073.091,34)</b>	<b>91,04</b>
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509.884.774.585,00	474.846.213.225,66	(35.038.561.359,14)	93,13
2 1 1	Belanja Pegawai	399.664.500.318,00	380.394.869.904,00	(19.269.630.414,00)	95,18
2 1 2	Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61
2 2	BELANJA LANGSUNG	351.089.991.266,00	309.005.479.533,80	(42.084.511.732,20)	88,01
2 2 1	Belanja Pegawai	90.615.588.703,00	80.794.926.619,00	(9.820.662.084,00)	89,16
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28
2 2 3	Belanja Modal	94.586.338.685,00	86.735.745.635,80	(7.850.593.049,20)	91,70
	Jumlah Belanja	860.974.785.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04
	Surplus/(Defisit)	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	26,62

- 2 -

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>143.847.315.073,00</b>	<b>143.752.738.194,54</b>	<b>(94.576.878,46)</b>	<b>99,93</b>
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.597.315.073,00	143.562.038.073,54	(35.276.999,46)	99,98
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.847.315.073,00	143.752.738.194,54	(94.576.878,46)	99,93
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.693.329.297,00</b>	<b>11.693.328.451,86</b>	<b>(845,14)</b>	<b>100,00</b>
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.693.329.297,00	11.693.328.451,86	(845,14)	100,00
	Pembiayaan Netto	132.153.985.776,00	132.059.409.742,68	(94.576.033,32)	99,93
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	98.196.733.349,97	98.196.733.349,97	100,00

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 89.406.806.073,97
  2. SISA KAS RSUD tahun 2009 sebesar Rp. 3.674.099.648,00
  3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2009 sebesar Rp. 5.115.827.628,00
- Rp. 98.196.733.349,97

**LAMPIRAN II : KETERANGAN IZIN  
PENELITIAN**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1428  
3549/34

Membaca Surat : Dari Kaprodi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta  
Nomor : 31/Kaprodi Akt/861/VI/2011 Tanggal : 13/05/2011

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada :

Nama	: BENOIT ISADORA JUITA W. D.	NO MHS / NIM	: 072114096
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta		
Alamat	: Mrican, Tromo! Pos 29 Yogyakarta		
Penanggungjawab	: Dr. Fr. Ninik Yudianti, M. Acc., QIA		
Keperluan	: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)		

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 19/05/2011 Sampai 19/08/2011

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

BENOIT ISADORA JUITA W. D.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 26-5-2011

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDONO  
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yk
3. Kaprodi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
4. Ybs.